

## **Perbandingan Pendekatan Politik - Ekonomi Media dan Studi Kebudayaan dalam Kajian Komunikasi Massa**

**Fahrizal Sukma<sup>1</sup>, Udi Rosadi<sup>2</sup>.**

<sup>1,2</sup>Program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta

Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

[fahrizal.sukma@gmail.com](mailto:fahrizal.sukma@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The influence of mass media on social and cultural interactions is a growing phenomenon. To come up with ideas that provide a thorough understanding of these events in these circumstances may be difficult for scholars who study the mass media. The political economy of media and cultural studies are two categories of critical approaches that share features, strengths, and weaknesses. By paying sufficient attention to these details, the two techniques can complement and learn from each other. This research seeks to study someone's opinion, response, or perception, so the discussion must be qualitative in nature or use descriptive language, so the writer uses a descriptive research methodology. When analyzing texts and explaining various subject positions or views, mass media studies must adopt a multi-perspective approach, or apply a critical methodology.*

**Keywords: Politics, Economics, Communication, Mass Media**

### **ABSTRAK**

Pengaruh media massa terhadap interaksi sosial dan budaya merupakan fenomena yang terus berkembang. Untuk menciptakan ide-ide yang memberikan pemahaman menyeluruh tentang kejadian ini, dalam keadaan ini, mungkin sulit bagi para sarjana yang mempelajari media massa. Ekonomi politik dari studi media dan budaya adalah dua kategori pendekatan kritis yang saling berbagi fitur, kekuatan, dan kelemahan. Dengan memberikan perhatian yang cukup pada perincian ini, kedua teknik tersebut dapat saling melengkapi dan belajar satu sama lain. Penelitian ini berusaha mempelajari pendapat, tanggapan, atau persepsi seseorang, maka pembahasannya akan bersifat kualitatif atau menggunakan bahasa deskriptif, sehingga penulis menggunakan metodologi penelitian deskriptif. Ketika menganalisis teks dan menjelaskan berbagai posisi subjek atau pandangan, studi media massa harus menggunakan pendekatan multi-perspektif, atau menerapkan metodologi kritis.

**Kata Kunci: Politik, Ekonomi, Komunikasi, Media Massa**

### **PENDAHULUAN**

Pengaruh media massa terhadap interaksi sosial dan budaya masyarakat merupakan fenomena yang terus berkembang. Untuk menciptakan ide-ide yang memberikan pemahaman menyeluruh tentang kejadian ini, dalam keadaan ini, mungkin sulit bagi para sarjana yang mempelajari media massa. Ekonomi politik dari studi media dan budaya adalah dua kategori pendekatan kritis yang berbagi fitur, kekuatan, dan kelemahan. Dengan memberikan perhatian yang cukup pada perincian ini, kedua teknik tersebut dapat saling melengkapi dan belajar satu sama lain (Coibion: 2022). Pendekatan ekonomi politik terhadap media yang cenderung berfokus pada satu aspek, yaitu pembuatan dan penyebaran media, dapat diperkuat dengan

memasukkan aspek lain, yaitu konsumsi khalayak, dan dengan memperhatikan kebebasan penafsiran khalayak. Berbeda dengan kajian budaya yang menekankan empirisme dalam isu etnografi dan politik-ekonomi (Bettig: 2018). Akibatnya ada sebagai berikut: (1) penelitian tentang tiga aspek produksi, ekonomi politik budaya, dan konsumsi harus dilakukan secara mendalam untuk menganalisis media massa dari berbagai perspektif dan mempertimbangkan berbagai objek. (3) Penelitian tentang akseptabilitas khalayak dan penggunaan barang-barang budaya/media secara polisemi dengan menggunakan teknik pengumpulan data empiris. (2) Analisis tekstual dan kritik terhadap artefak (Guriev: 2022).

Penciptaan, transmisi, dan modifikasi makna di dalam dan di antara latar sosial, jarak dan waktu nyata, disebut sebagai mediasi. Memindahkan makna dari satu teks ke teks lainnya, satu wacana ke wacana lain, atau satu pengalaman ke pengalaman lainnya merupakan komponen mediasi (Dreher: 2019). Saat teks media dan teks tentang media beredar dalam bentuk tulisan, suara, dan audiovisual, dan saat kita, secara individu dan kolektif, secara langsung dan tidak langsung, memengaruhi penciptaannya, hal itu memerlukan perubahan makna yang berkelanjutan, besar dan kecil, signifikan dan tidak penting (Karabag: 2020).

Makna sebagai penghubung bahasa dengan dunia luar sesuai dengan kesepakatan para pemakainya sehingga dapat saling dimengerti. Makna mempunyai tiga tingkat keberadaan, yaitu: (a) pada tingkat pertama, makna menjadi isi dari suatu bentuk kebahasaan, (b) pada tingkat kedua, makna menjadi isi dari suatu kebahasaan, dan (c) pada tingkat ketiga, makna menjadi isi komunikasi yang mampu membuahkan informasi tertentu.

Setiap analisis sosial kritis kapitalisme harus berpusat pada institusi transnasional yang semakin dominan dari kekuatan politik-ekonomi, seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Uni Eropa (UE), serta hubungan dekat mereka dengan unit politik yang tampak lebih kecil dan lebih lemah seperti negara bangsa. Hal yang sama berlaku untuk pemerintah negara bagian dan lokal, bisnis, dan proses produksi yang digunakan oleh perusahaan multinasional. Semua organisasi ini adalah contoh media. Berikut ini adalah deskripsi tentang bagaimana keterkaitan kita telah berubah sebagai akibat dari perubahan mediasi, bagaimana nilai dan bagaimana hal itu ditentukan telah berubah sebagai akibat dari perubahan keterkaitan, dan mengapa analisis kritis terhadap makna bermanfaat, jika tidak mutlak diperlukan, untuk memahami dinamika globalisasi saat ini. Untuk mendemonstrasikan bagaimana makna nilai telah ditempatkan secara terang-terangan dalam dunia pembuatan makna "resmi", yang tampaknya tanpa mengacu pada aspek realitas lainnya, saya mendekati tugas ini dengan menganalisis teks-teks dasar dari ekonomi politik.

Premis studi kritis tentang makna adalah bahwa ia secara dialektis terikat pada semua aktivitas sosial. Metode seperti itu tidak dapat mengandaikan sebab-sebab linier langsung atau bahwa makna entah bagaimana ada di luar realitas, apalagi memengaruhinya (Gandy: 2019). Bahasa adalah sekaligus komponen realitas,

pembentuk realitas, dan metafora realitas. Makna yang diciptakan manusia "tidak dapat dipahami di luar keadaan historisnya; namun juga tidak dapat ditarik dari latar ini dengan hubungan sederhana apa pun." Ini adalah perbedaan penting untuk setiap pemeriksaan kritis terhadap hubungan antara bahasa, media baru, dan gagasan nilai karena memerlukan studi tentang makna yang dikontekstualisasikan secara historis. Bagaimana, misalnya, nilai bergeser dari posisi formal dalam "nilai intrinsik" logam mulia menjadi posisi dalam opini keinginan yang dimediasi massa, dan kemudian, seperti dalam kasus teks, yang sederhana (namun dimediasi massa)? percakapan satu individu.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Teknik penelitian adalah pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data untuk tujuan tertentu. Istilah tergolong ilmiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jika berkonotasi ilmiah atau sesuai dengan standar (hukum) ilmu pengetahuan. Karena penelitian ini berusaha mempelajari pendapat, tanggapan, atau persepsi seseorang, maka pembahasannya harus bersifat kualitatif atau menggunakan bahasa deskriptif, maka penulis menggunakan metodologi penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk mengidentifikasi deskripsi yang akurat dan memadai dari semua tindakan, benda, proses, dan orang. Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti dibantu seorang asisten untuk mengumpulkan gagasan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pendekatan Politik-Ekonomi Media**

Para ahli dengan latar belakang ekonomi, ilmu politik, dan sosiologi mendirikan metode ekonomi politik kritis di fakultas ilmu sosial. Meskipun teori Marxis terutama merupakan sumber inspirasi pendekatan ini, variasi lain telah muncul di sepanjang jalan. Ahli teori media sering menggunakan metodologi neo-Marxis antara tahun 1960-an dan 1980-an. Berbeda dengan pluralis media yang menekankan peran media dalam mempromosikan kebebasan berbicara dan telah menjadi pandangan dominan di Amerika sejak tahun 1940-an, teori Marxis cenderung menekankan peran media massa dalam mempertahankan *status quo*.

Menanggapi pandangan fungsionalis masyarakat, perspektif neo-Marxis muncul dalam ilmu-ilmu sosial. Menurut aliran pemikiran fungsionalis, lembaga sosial berfungsi sebagai kekuatan pemersatu dalam sistem sosial budaya yang saling berhubungan. Fungsionalis menolak adanya konflik, sementara Marxisme memberikan perspektif yang berguna tentang konflik kelas.

"Khususnya pada tahun 1970-an dan awal 1980-an, neo-Marxisme muncul. Metode kajian media Marxisme menggunakan tiga paradigma, yaitu:

1. Marxisme Althusserian dengan fokus pada artikulasi internal sistem penandaan media adalah salah satu kelompok "strukturalis", antara lain.

2. Faksi "ekonomi politik" memandang ekonomi sebagai ideologi yang menggantikan. Graham Murdock, yang mengaitkan pengaruh media dengan kerangka ekonomi dan organisasi produksi media, termasuk dalam kelompok ini. Mengontrol pesan media dianggap sangat tergantung pada siapa yang memiliki dan mengontrol media.
3. Stuart Hall, perwakilan dari Marxisme Kultural, dan kelompok "kulturalis" menolak ekonomisme dan menekankan pengalaman nyata subkelompok dalam masyarakat dan kontekstualisasi media dalam masyarakat, yang dipandang sebagai "totalitas ekspresif yang kompleks". Kulturalis mengikuti kaum strukturalis dalam menekankan pengalaman aktual dan menolak ekonomisme. Center for Contemporary Cultural Studies (CCCS) di University of Birmingham, yang direktornya adalah Stuart Hall, mencerminkan pendekatan Budayawan dalam pekerjaannya. Seperti yang ditunjukkan Curran, ada perbedaan antara analisis teori Marxis tentang kekuatan media dan pengaruh ideologisnya yang tipikal."

Dalam hal negara-negara yang melakukan penelitian, Amerika Utara, Eropa, dan Dunia Ketiga dikelompokkan bersama ketika menggunakan metode politik-ekonomi untuk menganalisis komunikasi (Asia dan Afrika). Dallas Smythe dan Herbert Schiller memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penelitian di Amerika Utara. Metodologinya kurang akademis dan didasarkan pada tradisi institusional dan Marxian. Riset ini dilakukan karena rasa tidak adil karena bisnis komunikasi merupakan komponen penting dari tatanan korporasi yang lebih besar, eksploitatif, dan tidak demokratis. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pemahaman publik tentang hukum dan peraturan pemerintah (Nieborg: 2019).

Penelitian tentang gerakan sosial, khususnya penentangan terhadap sistem media layanan publik, dilakukan di seluruh Eropa. Kelompok ini memiliki landasan teoretis yang lebih kuat di sekolah NeoMarxian. Grup Garnham, Golding, dan Murdock, yang mengadvokasi modernisasi, monetisasi, dan kepemilikan publik atas pasar telekomunikasi, termasuk dalam kategori ini. Mereka menggarisbawahi praksis revolusioner, penyertaan organisasi konektivitas dengan konsep yang cocok dan bisnis (bisnis) dalam ekonomi kapitalis yang lebih besar, ketahanan kelas sosial, dan gerakan tubuh terhadap ketentuan hukum modernitas (Babe: 2018). Untuk menjelaskan komunikasi sebagai salah satu pendorong utama oposisi terhadap otoritas, Armand Mattelart menggabungkan sejarah teori ketergantungan, Marxisme Barat, dan keahlian dari gerakan deregulasi.

Reaksi terhadap modernisasi dan paradigma sosial demokrasi yang berasal dari Barat, khususnya Amerika Serikat, menjadi fokus utama penelitian negara ketiga, yang merangkum berbagai perspektif. Organisasi ini menggunakan komunikasi untuk memperoleh kepentingan politik dan intelektual dalam paradigma penjelasan yang simpatik. Komponen peringkat global adalah pertumbuhan media. Banyak metodologi digunakan, termasuk ekonomi politik Neo-Marxian, sistem global, dan teori ketergantungan. Pendekatan Prinsip dasar dari model ini ditentang oleh ekonom klasik di Dunia Ketiga, khususnya determinisme teknis dan kurangnya minat

dalam dinamika kekuasaan yang menentukan ketentuan perdagangan antara Dunia Pertama dan Dunia Ketiga, serta hubungan kelas antara lapisan.

The New Palgrave (Moscow: 2000) mengklaim bahwa politik-ekonomi adalah ilmu kesejahteraan dan terkait dengan upaya yang dilakukan orang untuk memuaskan dan memenuhi kebutuhan mereka. Penciptaan, distribusi, dan konsumsi sumber daya semuanya didasarkan pada ikatan sosial, khususnya hubungan kekuasaan, menurut Mosco, yang juga memberikan interpretasi politik-ekonomi dari hubungan ini.

Ada kelebihan dan kekurangan analisis marxis. Di antara keunggulan teori kritis Marxis adalah:

1. Mengungkap kekeliruan metodologi bebas nilai ilmu sosial.
2. Berikan demonstrasi yang berfokus pada kesenjangan sosial dalam representasi media dan masalah kepentingan ekonomi dan politik di media.
3. Menimbang teks media dalam konteks konstruksi sosial yang lebih besar.
4. Karena penekanan pada sifat ideologi, cita-cita yang kita anggap benar sedang didekonstruksi. Dengan menelaah representasi di media massa untuk menemukan ideologi yang mendasarinya, analisis ideologis membantu kita menemukan realitas pengelompokan sosial yang disajikan oleh media.
5. Meneliti mitos orang merdeka (Althusserian Marxism).
6. Terbuka terhadap ide membaca berbagai teks karena menganggap media sebagai tempat konflik ideologis (Neo-Marxis lain).
7. Menegaskan pentingnya kelas sosial ekonomi dalam hal kepemilikan media dan bagaimana pemirsa membaca teks media. Sementara teori Marxis lebih menekankan pada komponen material dari produksi dan reproduksi media, analisis dokumen dan analisis wacana lebih menekankan pada isi media. Kedudukan sosial ekonomi seseorang akan mempengaruhi akses media, yang selanjutnya akan mempengaruhi bagaimana informasi media dipahami.

Konstruksi makna sebagai alat kekuasaan, analisis tekstual, dan konsumsi media merupakan topik penelitian ekonomi-politik. Makna ciptaan sebagai sarana menjalankan kekuasaan (Graham: 2002). Kedudukan orang sebagai warga politik telah berubah sebagai akibat dari kemajuan ekonomi dan teknis, menjadikan mereka hanya komoditas dalam masyarakat kapitalis. Bagaimana perubahan dalam beragam variabel, terutama praktik kekuasaan atas penciptaan dan penyebaran budaya, membatasi atau memperluas ruang publik merupakan subjek kunci dari ekonomi politik komunikasi. (1) Pola kepemilikan institusional dan pengaruh kontrol institusional terhadap kegiatan mereka merupakan dua masalah penting di bidang ini. (2) Ciri-ciri interaksi antara peraturan pemerintah dan lembaga komunikasi.

Analisis tekstual dan ekonomi politik. Wacana publik diatur melalui bentuk budaya seperti program diskusi interaktif, berita, atau pemasaran kesehatan. Ada dua aspek dalam proses ini: (1) sejauh mana berbagai wacana dari suatu bentuk tertentu digantikan oleh wacana resmi atau artikulasi wacana alternatif, dan (2) sejauh mana audiens diberikan kebebasan untuk memilih bentuk wacana yang mereka sukai atau seberapa terbuka pilihannya.

Konsumsi: perjuangan atau kebebasan. Sudut pandang tentang kebebasan khalayak untuk memberikan makna atau nilai yang bersifat polisemi muncul sebagai tanggapan atas anggapan masyarakat sebagai pemirsa pasif terhadap media. Karena penonton masih memiliki kebebasan, hal ini meningkatkan persepsi organisasi liberal pluralis tentang perlunya menyeimbangkan penawaran dan permintaan budaya. Sudut pandang ini adalah romantisme populis, menurut penulis yang kritis dan radikal.

Tidak ada seorang pun yang memiliki akses penuh ke segala hal, membuat kemandirian konsumen secara total menjadi tidak mungkin. Tujuan ekonomi politik adalah untuk meneliti pembatasan yang membatasi kebebasan ini. Keterbatasan ini bersifat fisik dan budaya. Secara material, komoditas dan alat komunikasi ditawarkan dengan harga tertentu yang hanya dapat digunakan oleh nasabah dengan dana yang diperlukan. Selain itu, status materi media mungkin berdampak pada kebiasaan konsumsi beberapa kelompok. Akses ke barang-barang ini untuk kelompok "miskin" sangat dipengaruhi oleh pergeseran dari barang publik ke barang pribadi. Misalnya, orang kaya hanya bisa menggunakan pemancar untuk mendapatkan stasiun televisi tertentu. Akses budaya terhadap keterampilan budaya yang diperlukan untuk melihat dan menggunakan produk media nyata dengan cara tertentu diatur oleh status sosial. Tradisi empiris dalam kajian budaya berpendapat bahwa berbagai subkelompok muda menyerap komunikasi dengan berbagai cara.

## **Komunikasi Massa dan Gerakan Sosial**

Salah satu aspek penting dari seluruh proses penataan adalah konstruksi timbal balik kelas, jenis kelamin, dan ras. Meskipun ada risiko bahwa proses ini dapat dengan cepat berubah menjadi kumpulan pluralistik dari kategori sosial yang sama pentingnya, proses generasi dan lainnya akan dimasukkan dalam penyelidikan menyeluruh terhadap proses ini. Dalam perspektif ekonomi politik, penataan didefinisikan sebagai proses sosial yang dimulai dengan kelas, berkembang menjadi kategori, relasi, dan formasi, dan terutama dipengaruhi oleh gender dan ras. Risiko ekstra dari pemikiran mekanis tentang bagaimana kata-kata ini berfungsi dalam tindakan dan bagaimana mereka akan diselaraskan dalam praksis ada terlepas dari manfaat pendekatan tersebut. Haraway mengajukan kasusnya dari sudut feminis, merefleksikan tantangan menjembatani kelas, gender, dan ras, dan dia mengusulkan perlunya geometri hubungan sosial yang baru.

Terlepas dari etnis penulis, niat baik, dan komentar pembukaan, tampaknya sangat tidak biasa bagi teori feminis untuk menyatukan ras, jenis kelamin, dan kelas secara analitis. Selain itu, kaum feminis membantah sistem seks dan gender untuk alasan yang berbeda dari yang mereka lakukan pada sistem ras dan gender, dan keduanya bukanlah pendekatan analitik yang sama. Apa yang terjadi dengan kelas sekali lagi? Kebutuhan akan teori "berbeda" yang memperoleh geometri, paradigma, dan logikanya dari model biner, dialektika, dan alam/budaya mana pun tumbuh sebagai hasil bukti. Kalau tidak, ketiganya akan selalu direduksi menjadi dua, dan orang-orang itu akan segera menemukan diri mereka sendirian di barisan depan. Dan

tidak ada yang menguasai empat hitungan. Isu-isu ini sangat penting untuk komunikasi ekonomi politik dan signifikan secara politik, jika hanya karena mereka menantang semua esensialisme, terlepas dari kelas, jenis kelamin, atau warna kulit. Argumennya, bagaimanapun, melampaui ini dalam pesimismenya atas strategi yang digunakan di sini, yang menolak esensialisme dengan memberikan analisis berdasarkan banyak titik masuk dan kesimpulan. Sangat membantu untuk mempertimbangkan konsepsi lain dalam kerangka ekonomi politik yang lebih luas, meskipun fokus utama buku ini adalah pemeriksaan yang lebih optimis terhadap interaksi sosial kelas, gender, dan ras.

Gerakan sosial dan koneksi sosial hegemonik adalah dua bidang perhatian potensial. Manfaat melihat melampaui kategori sosial konvensional dengan berfokus pada kebebasan dan tindakan sosial ditunjukkan melalui analisis yang dibangun di sekitar gerakan sosial. Gerakan sosial menghubungkan individu dengan identitas sosial yang kurang lebih berbeda yang berbagi tujuan menantang dan mengubah hubungan kekuasaan yang ada. Orang-orang yang mengidentifikasi dengan posisi kelas tertentu, seperti serikat pekerja, yang kurang mampu, atau elit bisnis, mungkin bersatu melalui gerakan sosial. Selain itu, mereka dapat membina hubungan berdasarkan jenis kelamin atau ras, seperti yang ditunjukkan dalam penjangkauan gerakan feminis atau kesetaraan AS di depan hukum dan gerakan kekuatan hitam. Mereka juga dapat mengatur orang berdasarkan pengidentifikasi kuantitatif lainnya, termasuk usia atau negara asal. Kemampuan gerakan sosial, seperti untuk perdagangan yang adil atau melawan globalisasi ekuitas swasta, untuk melampaui kategori sosial tertentu dan menyatukan berbagai kelompok orang di sekitar kepentingan atau tujuan bersama biasanya menentukan keberhasilan mereka.

Gerakan feminis mungkin merupakan gerakan kategoris terbesar, tetapi ada beberapa gerakan dalam beberapa tahun terakhir yang menekankan identifikasi dengan tujuan dan sebab yang, meskipun tidak menghilangkan kepedulian terhadap kategori masyarakat, masih berorientasi pada tujuan tertentu. Apa yang disebut "gerakan sosial baru" ini sebagian besar berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan, globalisasi, kesehatan (khususnya perang melawan AIDS), dan orientasi seksual (pembebasan gay). Mereka menyatukan individu melintasi definisi tradisional dan meletakkan dasar untuk memberikan perhatian lebih pada kategori non-tradisional.

Meskipun banyak energi telah dikerahkan untuk memperdebatkan bahwa satu atau gerakan sosial lainnya secara politis lebih unggul dari yang lain, tidak jelas di mana letak garis antara kedua gerakan sosial tersebut. Beberapa berpendapat bahwa ekonomi informasi post-fordist atau postmodern mengurangi pentingnya kategori-kategori tersebut demi mendukung gerakan yang menyatukan beragam orang untuk mencapai tujuan yang lebih luas, seperti lingkungan. Yang lain menentang bahwa ekonomi politik global membuat gerakan berbasis kelas menjadi kurang penting dari sebelumnya.

Pendekatan gerakan sosial biasanya berfokus pada isu-isu ekonomi politik arus utama, sedangkan metodologi yang menarik perhatian kita pada gerakan

kontemporer cenderung lebih menekankan pada bukti identitas kontekstual, termasuk kemampuan berbagai bentuk media (situs jejaring sosial, reality TV, flash mob). untuk membentuk tautan. Sayangnya, terlepas dari kenyataan bahwa beasiswa tentang munculnya telah membuka jalan baru, perbedaan antara gerakan lama dan baru kurang mendapat perhatian daripada yang seharusnya, yang berdampak negatif pada potensi mereka untuk koalisi politik. Karena kategori yang lebih kontemporer seperti lingkungan dan gender atau seksualitas dibandingkan dengan yang lebih tradisional seperti kelas sosial ekonomi dalam studi yang lebih baru, hal ini mulai bergeser. Tidak dapat disangkal bahwa gerakan sosial besar di akhir abad ke-20 didasarkan pada isu-isu lingkungan, gender, dan ras.

Namun, ini tidak berarti bahwa tidak ada lagi pembagian kelas dalam masyarakat, karena tenaga kerja tidak lagi menjadi kekuatan dan aktivitas sosial utama, dan bahwa serikat pekerja tidak lagi relevan secara politik (Mosco dan McKercher, 2008). Pendekatan sosial global sangat membantu karena menolak protokol standar dari jenis lama dan baru dalam menambahkan fokus pada tindakan aktivitas politik. Gerakan sosial memiliki dampak signifikan pada metode dan isi transmisi, yang membuatnya penting untuk memahami komunikasi ekonomi politik. Semua gerakan sosial yang signifikan telah menciptakan kebijakan dan strategi komunikasi sebagai tanggapan terhadap tantangan yang tak terhindarkan tentang bagaimana mengelola komunikasi internal dan eksternal. Sejauh mana sebuah gerakan harus mengadopsi mode arus utama komunikasi eksternal, tingkat perhatian khusus atau profesional yang harus diberikan sebuah gerakan pada aktivitas media, dan seberapa demokratis saluran komunikasi internal seharusnya, adalah beberapa pertanyaan yang paling penting.

Perluasan gerakan feminis dan hak-hak sipil memberi dorongan untuk reformasi penyiaran. Itu Komisi Komunikasi Federal, regulator federal, telah menolak postur seperti perampasan kekuasaannya, oleh karena itu yang pertama menggunakan pengadilan untuk menetapkan posisi grup sebagai melindungi pandangan masyarakat umum sebelumnya. Bersama dengan rekan mereka dalam gerakan hak-hak sipil, organisasi feminis mengkritik prosedur perekrutan yang diterima dan inisiatif yang merendahkan. Hak menggunakan upaya medianya yang kuat untuk memerangi apa yang dianggapnya sebagai kebijakan yang menjijikkan secara moral setelah mempelajari gerakan kiri-tengah ini. Rencana pemulihan media pemerintah telah dihidupkan kembali oleh kemajuan saat ini dalam studi teknologi multimedia, terutama pertumbuhan konsolidasi media dan pemeliharaan kesenjangan akses.

## **Pendekatan Politik-Ekonomi Media dan Studi Kebudayaan**

Di antara kedua studi tersebut, sangat penting untuk mempelajari teknik dari domain yang berbeda untuk membangun kedua jenis investigasi tersebut. Jika masing-masing pengikut ini memiliki sifat terbuka, hal ini dimungkinkan untuk dilakukan. Jika ada titik konvergensi, seperti kesamaan, antara keduanya, proses saling melengkapi dapat terjadi (substansi yang dipelajari dan landasan filosofisnya).



Mengingat kedua disiplin ilmu tersebut memiliki variasi, penggabungan kedua metode tersebut dimungkinkan antara metodologi ekonomi politik dari bentuk studi budaya neo-Marxis (Mosco, Golding dan Murdock, dll.) dan (Stuart Hall).

Karena orientasi kritis mereka, media kritis memiliki kesamaan dengan ekonomi politik dan studi budaya, khususnya:

1. Perspektif tentang subjektivitas, yang berpandangan bahwa karena keadaan dan kondisi kelahirannya, orang pada prinsipnya tidak dapat menjadi subyektif karena akan membawa kebebasan (bahasa, budaya, ras, politik gender dan kelas tertentu).
2. Gagasan bahwa kesadaran tidak terbatas pada yang terlihat di permukaan dan juga dapat terkubur.
3. Sudut pandang ideologis yang memegang subjek dalam genggamannya sementara juga memenjarakan mereka hanya dapat ditentang oleh revolusi sosial atau oleh negara yang memanipulasi bentuk-bentuk budaya suprastruktur-pendidikan, media, agama, dan seni-serta subjek manipulasi semacam itu.
4. Polisemi dan kritik. Setiap upaya untuk memahami atau berteori evolusi masyarakat harus dimulai dengan kritik radikal yang dapat digunakan sebagai katalis perubahan sosial jika kesadaran dapat dipahami sebagai substansi ideologis, pendidikan sebagai alat hegemoni, dan intelektual sebagai agen yang tidak sadar akan penindasan tanpa pergolakan. Kritik feminis, pascakolonial, dan antirasial adalah contoh kritik ideologis. Alat atau sumber dekonstruktif untuk mengkritisi ideologi adalah gagasan polisemi. Teks-teks yang dikritik karena diappropriasi oleh ideologi yang berlaku memiliki sumber daya ini.

Kemiripan antara Frankfurt School dan British Cultural Studies, khususnya versi Marxis:

1. Periksa kegagalan proyek revolusi Marxian.
2. Budaya massa secara signifikan berkontribusi pada integrasi kelas pekerja ke dalam masyarakat kapitalis, dan media baru serta budaya konsumen memengaruhi bentuk baru hegemoni kapitalis.
3. Kedua aliran pemikiran menekankan hubungan antara budaya dan ideologi dan menganggap analisis ideologis sebagai komponen kunci dari kajian budaya kritis.
4. Keduanya memandang budaya sebagai bentuk reproduksi ideologis dan hegemoni, dimana bentuk budaya membantu membentuk sikap dan tindakan masyarakat, yang kemudian mempengaruhi masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial masyarakat kapitalis.
5. Keduanya memandang kebudayaan tinggi sebagai bentuk perlawanan terhadap modernitas kapitalis dan kebudayaan sebagai kekuatan perlawanan terhadap masyarakat kapitalis.
6. Keduanya percaya bahwa karena temuan penelitian terkait dengan pemeriksaan masyarakat, politik, dan ekonomi, budaya harus diperiksa dalam konteks hubungan dan struktur sosial tempat budaya dibuat dan dikonsumsi.
7. Keduanya mendukung kolaborasi interdisipliner dan menentang pemisahan bidang akademik.

Untuk menghindari elitisme budaya dan populisme budaya, studi budaya dan ekonomi politik harus digabungkan dengan gagasan audiens yang aktif dan dimanipulasi untuk menangkap berbagai efek media. Berdasarkan penegasan tersebut, maka untuk menyempurnakan masing-masing pendekatan, pendekatan ekonomi politik media perlu menggunakan konsep dari kajian budaya tentang khalayak aktif, dan sebaliknya, pendekatan kajian budaya perlu menggunakan konsep dari pendekatan ekonomi tentang khalayak yang dipengaruhi oleh kondisi sosial (seperti politik, ekonomi, dan budaya). media politik. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan sirkuit produksi, distribusi, dan konsumsi media ketika mempelajari media.

Jika Anda mulai dengan ekonomi politik media dan epistemologinya yang realistis, inklusif, dan kritis, juga dikenal sebagai epistemologi terintegrasi, akan lebih mudah untuk menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Basis realisme adalah perspektif yang mencakup banyak rangkaian kategori nominal dari kategori ideal yang diputuskan secara subyektif. Karena bersifat inklusif, terbuka, dan non-reduksionis, kehidupan sosial secara keseluruhan tidak dapat dirangkul oleh satu teori saja. Kedua, tidak ada satu pun strategi terbaik. Studi disiplin lain, seperti studi budaya dan studi kebijakan, dimulai dengan ekonomi politik. Akibatnya, realitas sosial secara khusus memiliki determinasi ganda, atau relatif mandiri tetapi juga interaktif.

Ekonomi politik adalah studi tentang bagaimana budaya diproduksi dan disebarluaskan dalam sistem ekonomi tertentu. Interaksi antara negara, ekonomi, media, institusi sosial, dan perilaku sosial, budaya, dan keseharian ini menjadi dasar ekonomi politik. Oleh karena itu output budaya difokuskan pada pasar. Relasi produksi yang dominan, yang berdampak signifikan pada jenis barang budaya yang diproduksi dan dikonsumsi, adalah bagaimana kekuatan produktif (seperti teknologi media dan aktivitas kreatif) diorganisasikan. Jenis barang yang diproduksi sering kali ditentukan oleh sistem produksi, demikian pula batasan struktural atas apa yang dapat dikatakan atau ditampilkan dan ekspektasi penonton.

Sistem keuangan akan menggunakan pengkodean (*encoding*) dan decoding (*decoding*). Penciptaan dibagi menjadi genre yang mapan dalam sistem komersial budaya media, dengan norma dan alat produksi yang berbeda. Kajian tentang produksi budaya dapat membantu dalam mendeskripsikan kode-kode kerja, sehingga menjelaskan banyak jenis teks yang dihasilkan, karena bentuk-bentuk budaya diatur oleh norma dan konvensi yang mapan. Misalnya, mekanisme distribusi menentukan bahwa sebagian besar musik pop berdurasi 3–4 menit karena permintaan dari radio dan televisi. Ilustrasi lain adalah fakta bahwa stasiun televisi di Indonesia sering menayangkan sinetron murah dari Amerika Latin atau Thailand karena dimiliki oleh bisnis yang mengutamakan keuntungan. Namun, jika dibuat oleh perusahaan produksi, topik yang disarankan adalah yang bisa dijual seperti cerita rakyat, sinetron, dll.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Tidak ada seorang pun yang memiliki akses penuh ke segala hal, membuat kemandirian konsumen secara total menjadi tidak mungkin. Tujuan ekonomi politik adalah untuk meneliti pembatasan yang membatasi kebebasan ini. Keterbatasan ini bersifat fisik dan budaya. Secara material, komoditas dan alat komunikasi ditawarkan dengan harga tertentu yang hanya dapat digunakan oleh nasabah dengan dana yang diperlukan. Selain itu, status materi media mungkin berdampak pada kebiasaan konsumsi beberapa kelompok.

Perluasan gerakan feminis dan hak-hak sipil memberi dorongan untuk reformasi penyiaran. Itu Komisi Komunikasi Federal, regulator federal, telah menolak postur seperti perampasan kekuasaannya, oleh karena itu yang pertama menggunakan pengadilan untuk menetapkan posisi grup sebagai melindungi pandangan masyarakat umum sebelumnya. Bersama dengan rekan mereka dalam gerakan hak-hak sipil, organisasi feminis mengkritik prosedur perekrutan yang diterima dan inisiatif yang merendahkan. Hak menggunakan upaya medianya yang kuat untuk memerangi apa yang dianggapnya sebagai kebijakan yang menjijikkan secara moral setelah mempelajari gerakan kiri-tengah ini.

Sistem keuangan akan menggunakan pengkodean (*encoding*) dan decoding (*decoding*). Penciptaan dibagi menjadi genre yang mapan dalam sistem komersial budaya media, dengan norma dan alat produksi yang berbeda. Kajian tentang produksi budaya dapat membantu dalam mendeskripsikan kode-kode kerja, sehingga menjelaskan banyak jenis teks yang dihasilkan, karena bentuk-bentuk budaya diatur oleh norma dan konvensi yang mapan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Babe, R. E. (2018). *Communication And the Transformation of Economics: Essays in Information, Public Policy, And Political Economy*. Routledge.
- Bettig, R. V. (2018). *Copyrighting Culture: The Political Economy of Intellectual Property*. Routledge.
- Coibion, O., Gorodnichenko, Y., & Weber, M. (2022). *Monetary Policy Communications and Their Effects on Household Inflation Expectations*. *Journal of Political Economy*, 130(6), 000-000.
- Dreher, A., & Lang, V. F. (2019). *The Political Economy of International Organizations*. *The Oxford handbook of public choice*, 2, 607-652.
- Gandy Jr, O. H., & Nemorin, S. (2019). *Toward A Political Economy of Nudge: Smart City Variations*. *Information, Communication & Society*, 22(14), 2112-2126.
- Golding, P., & Murdock, G. (1991). *Culture, Communications and Political Economy*. *Mass media and society*, 2(1), 15-32.
- Graham, P. (2002). *Hyper capitalism: Language, New Media and Social Perceptions of Value*. *Discourse & Society*, 13(2), 227-249.
- Guriev, S., & Papaioannou, E. (2022). *The Political Economy of Populism*. *Journal of Economic Literature*, 60(3), 753-832.
- Innis, H. A. (2018). *Political Economy in The Modern State*. University of Toronto Press.

- Jia, L., & Winseck, D. (2018). *The Political Economy of Chinese Internet Companies: Financialization, Concentration, And Capitalization*. International Communication Gazette, 80(1), 30-59.
- Karabag, S. F. (2020). *An Unprecedented Global Crisis! The Global, Regional, National, Political, Economic and Commercial Impact of The Coronavirus Pandemic*. Journal of Applied Economics and Business Research, 10(1), 1-6.
- Louw, E. (2001). *The Media and Cultural Production*. Sage.
- Mosco, V. (2000). *The Political Economy of Communication: Rethinking and Renewal*.
- Nieborg, D. B., & Helmond, A. (2019). *The Political Economy of Facebook's Platformization in The Mobile Ecosystem: Facebook Messenger as A Platform Instance*. Media, Culture & Society, 41(2), 196-218.
- Wasko, J., Murdock, G., & Sousa, H. (Eds.). (2011). *The Handbook of Political Economy of Communications*. John Wiley & Sons.